

DAMPAK ASEAN TRADE FACILITATION TERHADAP DAYA SAING DAERAH¹

Dedi Budiman Hakim

Staff Pengajar Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB. Wing Rektorat IPB Lantai 3, Kampus IPB Darmaga
Bogor 16680 Tlp. +62-251-8626-602, E-mail: *dbhakim@ipb.ac.id*

ABSTRACT

Reducing import tariff rates under the ASEAN-CEPT scheme was considered not significantly to enhance trade flows within the region. Trade facilitation instruments such as mutual recognition arrangement, harmonization on customs procedure and the improvement of other trade-supporting infrastructure were then introduced by the members. Gravity model used in this paper identified a positive impact of such policies in improving trade atmosphere. Local governments can actively play an important role in supporting the conducive environment by providing an efficient bureaucratic system and facilities surrounding harbors. This then reduce transaction cost facing by the private sector and expectedly improve local economic activity in the region.

Keyword: ASEAN, Trade Facilitation, Local Government

PENDAHULUAN

ASEAN telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama ekonominya dengan memperluas cakupan liberalisasi perdagangan. Semula liberalisasi perdagangan di kawasan ini diakomodasi dalam klausul AFTA 1992. AFTA 1992 saat itu hanya menekankan kepada upaya pengurangan bea masuk antara 0 sampai 5 persen dan jadwal penurunan tariff tersebut didokumentasikan dalam bentuk *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT). Dampak kebijakan tersebut terlihat dari pertumbuhan intra-trade di kawasan ini. Di

bandingkan dengan kerjasama ekonomi regional di wilayah lain kecuali EU, NAFTA dan AU-NZ *Close Economic Relation* (CER), intra trade ASEAN cukup besar di atas 20 %. Walaupun harus diakui perdagangan bilateral dengan EU, Jepang dan AS masih menjadi tujuan utama ekspor dan impor (Tabel 1).

Mengingat percepatan perdagangan tidak cukup melalui penurunan tarif, ASEAN sepakat untuk memperluas cakupan liberalisasi perdagangan dengan instrumen fasilitasi prosedur perdagangan (*trade facilitation*). Kebijakan trade facilitation sudah menjadi agenda utama WTO karena kendala dalam perdagangan bukan pada berapa besar hambatan tariff namun lebih kepada prosedurnya.

Hubungan antara fasilitasi perdagangan dengan kebijakan pemerintah daerah sangat erat karena terkait sejauh mana kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah menjadi katalisator

¹ Makalah ini adalah bagian dari penelitian yang dibiayai oleh UNDP melalui ARTNet yang berkedudukan di Bangkok. Penulis menyampaikan terima kasih kepada Yann Duval atas komentar dalam proses draft dan Sahara, MSi dan Amzul Rifin, MA atas bantuannya selama persiapan, analisa dan penulisan laporan.



Tabel 1. Sumber dan Tujuan Perdagangan ASEAN 2006

Negara/Wilayah	(US \$ juta)			Proporsi terhadap Total		
	Ekspor	Impor	Total	Ekspor	Impor	Total
ASEAN	163.862	141.030	304.893	25,3	24,5	24,9
USA	92,941	60,976	153,918	14,3	10,6	12,6
Jepang	72,756	81,077	153,834	11,2	14,1	12,6
Uni Eropa (EU) ^{1/}	80,922	59,611	140,533	12,5	10,3	11,5
China	52,257	61,136	113,393	8,1	10,6	9,3
Korea Selatan	24,362	23,609	47,971	3,8	4,1	3,9
Australia	19,645	11,593	31,238	3,0	2,0	2,6
India	15,048	7,952	23,000	2,3	1,4	1,9
Kanada	3,141	2,832	5,973	0,5	0,5	0,5
Rusia	1,468	3,234	4,703	0,2	0,6	0,4
Selandia Baru	2,633	1,455	4,089	0,4	0,3	0,3
Pakistan	2,142	180	2,322	0,3	-	0,2
Total	531,182	454,691	985,873	82,0	78,8	80,5
Lainnya ^{2/}	116,964	122,051	239,015	18,0	21,2	19,5
Total	648,147	576,742	1,224,889	100,0	100,0	100,0

Sumber : ASEAN Trade Database

Catatan : - Data tidak tersedia pada di saat publikasi

1/ Meliputi Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, dan United Kingdom

2/ Diluar Negara di atas

pertumbuhan ekonomi yaitu berkembangnya investasi dan perdagangan atau menjadi kendala (*constraints*). Makalah ini akan mencoba menganalisis, pertama adalah melihat dampak trade facilitation terhadap aliran perdagangan di kawasan ASEAN dan kedua, sejauhmana implikasinya terhadap daya saing daerah.

Tekanan terhadap kebutuhan fiskal karena mengejar pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan, pemerintah daerah cenderung melakukan pendekatan jangka pendek dengan memberlakukan segala instrumen pajak daerah dan retribusi. Bagi investor kebijakan ini dipandang akan meningkatkan biaya produksi sehingga produknya menjadi kurang kompetitif. Proses birokrasi perijinan yang cukup panjang dan lama hanya akan menjadi *high cost economy* yang akhirnya akan menjadi

counter-productive dan mengurangi manfaat perlu pertumbuhan ekonomi sendiri.

Asean Trade Facilitation

Hakim (2004) memperlihatkan keterbatasan instrumen penurunan bea masuk dalam meningkatkan perdagangan di kawasan ini. Para eksportir dan importir lebih memperhatikan sejauhmana proses penyelesaian prosedur ekspor dan impor. Proses ini tidak hanya berdampak terhadap biaya yang cukup tinggi juga berdampak terhadap biaya imbalan (*opportunity cost*) karena adanya proses menunggu yang cukup lama. Untuk itu Sekretariat ASEAN mengeluarkan kebijakan fasilitasi perdagangan (*trade facilitation*) untuk mengurangi kendala di atas. Fasilitasi perdagangan tersebut meliputi:



a) **Harmonisasi *Tariff Nomenclature***

Tujuan diberlakukannya dua instrumen ini adalah:

- 1) Bagi klasifikasi tarif: (a) mempercepat proses aliran barang di antara negara anggota dengan menyediakan informasi klasifikasi tarif yang sama. Dengan informasi ini diharapkan eksportir akan dapat mengurangi biaya transaksi pada saat proses angkut dan bongkar barang di pelabuhan dan (b) memperbaiki proses atau mekanisme pungutan pajak.
- 2) Bagi pengumpulan data: (a) mempercepat proses penyusunan data *bilateral trade flows* dan (b) mempermudah analisa aliran barang. Dengan demikian pengambil kebijakan akan dapat mudah memperbaiki dan meningkatkan pelayanan proses kebeacukaaian.

Produk dalam skema CEPT diklasifikasikan ke dalam 21 kategori, dari kategori 1 (ternak hidup, produk yang berasal dari ternak) sampai kategori 21 (produk seni, koleksi dan produk antik). Setiap anggota wajib mencantumkan sampai 8 digit klasifikasi produk yang didokumentasikan dalam *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature* (AHTN). Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan transaksi dan pengumpulan data statistik. Akan tetapi protokol tentang ini juga memberikan keleluasaan untuk membagi lagi lebih dari 8 digit. Awal tahun 2004 instrumen ini sudah diimplementasikan.

b) **Harmonisasi Prosedur Kebeacukaaian**

Proses ekspor di ASEAN mengacu kepada suatu dokumen yaitu *ASEAN CEPT declaration form*. Dokumen ini digunakan untuk menjelaskan asal barang (*the certificate of origin*), prosedur ekspor dari negara asal dan prosedur impor. Setiap

barang yang siap diekspor dan sudah tiba di negara tujuan (importing countries) harus melalui proses pengisian *Export Customs Declaration form* dan *Import Customs Declaration form*. Untuk mendukung mekanisme ini *ASEAN-wide Electronic Data Interchange (EDI) Export/Import Declaration System* akan dikembangkan. Sistem ini akan mempercepat dan mengurangi biaya proses sehingga mengurangi biaya-biaya yang tidak diperlukan.

Para anggota juga sepakat untuk mempermudah dan menseragamkan proses ini dengan cara yang lebih transparansi, konsisten, efisiensi dan prosedur yang lebih sederhana. Diharapkan dengan keempat pendekatan yang dikembangkan dan disepakati, para eksportir dan importir akan mendapatkan kejelasan kapan dan berapa lama proses pengajuan dokumen akan selesai. Demikian pula pemeriksaan barang yang akan diekspor dan barang yang sudah di pelabuhan akan lebih mudah dan transparan.

c) ***Mutual Recognition Agreements (MRAs)***

Produk yang diperdagangkan di kawasan ini masih belum seragam sehingga negara pengimpor harus melakukan pengujian kembali apakah produk yang masuk memenuhi standar kualitas yang ditentukan. Pengujian ini menyebabkan produk tidak cepat dipasarkan dan pihak importir akan dibebankan biaya pengujian tersebut. Untuk mengurangi hambatan ini komite yang bertugas untuk membahas masalah standarisasi dan kualitas produk (*ASEAN Consultative Committee for Standard dan Quality*). Tiga area yang menjadi focus bahasan, yaitu **harmonisasi standar produk**, kesepakatan pengakuan atas pengujian barang (*mutual recognition arrangements on conformity*) dan regulasi



terhadap standar produk. Produk yang pertama kali disepakati untuk dimasukkan kedalam MRA adalah produk elektronik, kosmetik dan farmasi. Tujuan dan manfaat MRAs ini adalah:

- 1) Mengembangkan prinsip bersama dalam pengakuan atas pengujian di negara asal sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan hambatan

$$\ln(IM_{ijt}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(GDP_{ijt}) + \beta_2 \ln(DGDPPC_{ijt}) + \beta_3 \ln(DIS_{ij}) + \beta_4 \ln(RER_{ijt}) + \beta_5 (TAR_{jt}) + \beta_6 (CP_{jt}) + \beta_7 (HTN_{jt}) + \beta_8 (MRA_{jt}) + \varepsilon_{ijt}$$

Di mana:

IM_{ijt}	: Impor dari negara i ke negara j pada tahun t
GDP_{ijt}	: Multiplikasi real GDP negara idengan real GDP negara j pada tahun t
$DGDPPC_{ijt}$: Perbedaan GDP per-kapita antara negara i dan j pada tahun t
DIS_{ij}	: Jarak ekonomi dua negara i dan j pada tahun t
TAR_{jt}	: Bea masuk negara negara j pada tahun t
RER_{ijt}	: Nilai tukar riil antara negara i dan j pada tahun t
CP_{jt}	: Prosedur kebebasan di negara j pada tahun t
HTN_{jt}	: Harmonisasi tariff nomenclature negara j pada tahun t (dummy variable)
MRA_{jt}	: Mutual recognition agreements pada tahun t (dummy variable)

perdagangan bukan tariff.

- 2) Mengurangi biaya karena tidak diperlukan pengujian ulang di negara tujuan ekspor karena secara otomatis produk yang sudah diuji akan diakui di negara tujuan. Dampaknya harga produk akan lebih rendah sehingga menciptakan persaingan.
- 3) Memberikan kejelasan dan kepastian akan akses pasar.
- 4) Meningkatkan persaingan dan inovasi.
- 5) Menjamin kualitas produk yang diperdagangkan di wilayah ASEAN. Konsumen akan mendapatkan barang yang berkualitas dan terjamin kesehatannya.
- 6) Membangun forum bagi lembaga-lembaga terkait untuk sharing pengetahuan dan pengalaman.

METODE ANALISIS DAN SUMBER DATA

Untuk menjawab masalah di atas, model gravity digunakan untuk produk elektronik dan farmasi yang mencakup 5 (lima) yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand. Model regresi tersebut adalah:

Data nilai impor dari tahun 2001 sampai 2005 berasal dari Commodity and Trade Database (COMTRADE) dengan dua kategori produk (HS33 untuk produk kosmetik dan HS 85 untuk produk elektronik. GDP riil digunakan untuk mengukur ukuran negara sedangkan GDP per kapita untuk menjelsakan tingkat kesejahteraan. Data ini diperoleh dari *World Development Indicators (WDI) of the World Bank*. Jarak digunakan untuk memproksi biaya transportasi.

Dalam kajian ini jarak yang digunakan adalah jarak ekonomi dengan mengalikan jarak nautical dengan rasio GDP-nya. Data jarak mil laut diperoleh dari *website www.indo.com/distance*. Tarif berasal dari *Trade Analysis and Information System (TRAINS) of the UNCTAD*.



Prosedur Kebeacukaaian

Peubah ini menjelaskan sejauhmana dampak pelayanan publik dalam mempermudah proses pengajuan dan penyelesaian dokumen. Data yang tepat untuk mewakili peubah ini tidak dapat diperoleh. Sebagai pendekatan lainnya, hasil survey yang didokumentasikan World Competitiveness Yearbook akan dijadikan acuan. Setiap tahun dilakukan survey kepada para eksekutif dan ditanyakan beberapa pertanyaan yang terkait dengan: *economic performance, government efficiency, business efficiency* dan *infrastructure*. Setiap pertanyaan dielaborasi kedalam beberapa sub factor dan kemudian diberikan indeks. Secara umum tujuan survey ini untuk melihat ranking negara-negara terpilih menurut kemampuan daya saing. Posisi daya saing Indonesia pada tahun 2007 terlihat pada lampiran di bawah ini.

Peubah ini juga menunjukkan peranan lembaga publik dalam membantu sektor swasta untuk mengembangkan bisnisnya. Lembaga publik dapat berada di pusat pemerintahan, yaitu departemen-departemen juga yang berada di pemerintahan daerah. Dengan demikian peubah ini juga menggambarkan bagaimana *government efficiency* mempengaruhi kelancaran proses impor yang akhirnya berdampak terhadap iklim bisnis usaha.

HASIL ANALISIS

Pembahasan di makalah ini akan dibatasi hanya pada variabel atau peubah ASEAN trade facilitation, yaitu prosedur kebeacukaaian, harmonisasi pengklasifikasian tarif dan MRA. Akan tetapi mengingat Indonesia memiliki beberapa pelabuhan ekspor seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak dan Makassar, peubah

jarak akan menjadi relevan untuk didiskusikan. Dari hasil analisis terlihat pada peubah ini cukup nyata mempengaruhi aliran perdagangan di kawasan ASEAN. Jarak antar dua kota pelabuhan dalam dua negara yang berbeda akan mencerminkan biaya transportasi yang akan menjadi beban konsumen di negara akhir (*importing countries*).

Importir akan mempertimbangkan berapa besar selisih antara CIF dan FOB. Jika selisih ini cukup rendah maka harga produk akan lebih kompetitif dengan asumsi importir tidak memperhitungkan bea masuk. Dari Tabel 1 terlihat bahwa jarak antar negara masih merupakan kendala dalam meningkatkan volume perdagangan. Jarak yang semakin jauh antar negara terdapat kecenderungan penurunan volume atau nilai perdagangan. Untuk mengurangi kendala ini, prinsip skala ekonomi (*economies of scale*) akan menjadi pegangan para importir untuk menekan biaya transportasi per unitnya. Jika memungkinkan berada pada kondisi *diminishing return* agar importir dapat meningkatkan volume perdagangannya.

Kerjasama teknis (*technical cooperation*) dalam menstandarisasi proses pengujian produk di negara asal (*exporting countries*) berdampak positif terhadap volume perdagangan di kawasan ASEAN. Kesamaan prosedur pengujian produk di negara asal barang menyebabkan importir tidak memerlukan lagi pengujian kembali produk untuk memenuhi standar kualitas dan safety atau kesehatan di negara

² Dalam kajian ini Singapura juga dimasukkan ke dalam model. Dalam beberapa terbitan the World Competitiveness Yearbook, negara ini mendapatkan ranking teratas setelah Amerika Serikat. Karena secara individu sharenya relatif rendah maka model ini menjadi bias terhadap negara-negara lain. Singapura masih merupakan negara yang dinilai paling baik pelayanan sektor publiknya sehingga -menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

tujuan ekspor. Eksportir dapat menekan biaya pengujian dan mungkin biaya-biaya yang tidak terkait dengan pengujian itu sendiri. Atau dengan kata lain pengakuan hasil uji di negara asal barang akan menekan biaya transaksi (*bureaucratic and business inefficiency*). Jika cara ini dilakukan dalam kondisi kompetitif, maka harga jual produk tersebut akan sama dengan biaya marjinalnya. Dampaknya konsumen akan diuntungkan karena *consumer surplusnya* akan lebih besar dibandingkan dengan tidak ada kesepakatan ini. Perlu ditekankan di sini, ASAN masih terbatas mengembangkan kerjasama MRAny pada beberapa produk. Semakin banyak produk yang dimasukkan dalam kerangka MRA, semakin besar pula manfaat yang akan diperoleh oleh eksportir/importir dan juga konsumen. Di lain pihak, pemerintahpun mendapatkan manfaat dengan adanya pola pengujian ini karena akan selalu dituntut untuk melakukan inovasi atau peningkatan kualitas pelayanan pengujianya.

Di kawasan ASEAN dampak pelayanan publik dalam kelancaran proses ekspor dan impor masih belum terlihat nyata. Walaupun koefisien peubah *customs procedure* bertanda positif yang menandakan hubungan sebab akibat yang

sejalan, peubah ini belum dapat dikatakan secara ekonometrik berpengaruh secara nyata. Tidak nyatanya peubah ini mengindikasikan bahwa sektor swasta di kawasan ini belum mendapatkan pelayanan yang maksimal dari sektor publik dalam menyelesaikan segala hal terkait dengan kelancaran usaha dan investasinya². Khusus kepada Indonesia, dukungan sektor publik dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang kompetitif masih rendah (Tabel 2). Ketidakefisienan sektor publik yang menciptakan tingginya biaya transaksi (*transaction cost*), ketidaklengkapan dan ketidakcukupan kondisi infrastruktur ditambah oleh regulasi perpajakan khususnya pajak daerah, dinilai oleh kalangan usaha menjadi kendala terbesar untuk bisnis di Indonesia.

Implikasi Kebijakan

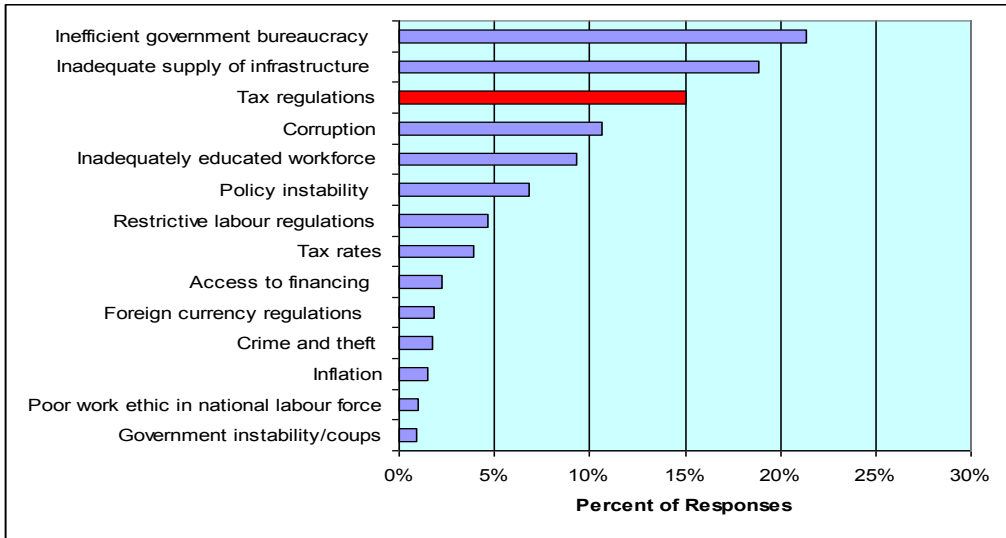
Walaupun penelitian ini dilakukan di tingkat nasional namun memiliki keterkaitan langsung dengan pemerintah daerah. Keinginan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (*fiscal need*) berdampak terhadap tekanan terhadap kapasitas fiskal yang terbatas. Tekanan yang cukup berat seringkali direspon dengan upaya peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dengan instrumen pajak daerah dan

Tabel 2. Hasil Regresi Analisis

	Variabel Bebas	
	HS85 + HS33	
Constant	99,33*	6,32 ¹⁾
GDP _i * GDP _i (β_1)	-1,56*	-5,18
GDP per capita difference (β_2)	0,52*	5,66
Distance (β_3)	-0,66*	-3,34
Real Exchange Rate (β_4)	-0,12*	-3,25
Tariff (β_5)	0,04	0,12
Harmonization of Tariff Nomenclature (β_6)	-0,54	-0,29
Custom Procedure (β_7)	0,13	0,03
Mutual Recognition Agreement (β_8)	0,55*	1,94
R ²	0,79	
R ² adjusted	0,77	

Catatan: 1) t-rasio dan * nyata pada level 10 persen





Gambar 1. Faktor-faktor Penghambat Lingkungan yang Kompetitif

Sumber: World Economic Forum (2005)

retribusi. Di satu pihak kebijakan fiskal ini berkontribusi terhadap pembiayaan rutin dan pembangunan daerah. Akan tetapi akan menjadi counter-productive dalam rangka menarik investai ke daerah yang bersangkutan.

Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai respon terhadap tekanan pihak investor untuk lebih transparan dan *fairness*. Prosedur perijinan dan prosedur penyelesaian dokumen ekspor-impor diharapkan dapat dipermudah. Kerjasama Pemerintah Daerah Propinsi Jatim dengan Pemerintah Jepang, *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dapat menjadi contoh bagaimana respon pemerintah daerah dalam meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Jawa Timur mengakui bahwa prosedur ekspor-impor masih wewenang pemerintah pusat. Namun dalam era otonomi kewajiban infrastruktur berada pada wewenang pemerintah daerah oleh karena itu bantuan Jepang ini akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan pelayanan

di pelabuhan karena akhirnya akan menciptakan permintaan produk yang meningkat dan pertumbuhan ekonomi akan terjadi dan kesempatan kerja akan terbuka dengan luas karena adanya permintaan akan produk dan jasa.

Hasil dari Kasus China: Hampton (2006) dalam studinya mengenai *Local Government and Investment Promotion in China* menyatakan bahwa desentralisasi politik yang memberikan wewenang kuat kepada pemerintah local telah memberikan andil dalam pertumbuhan ekonomi di negara ini. Transfer wewenang tersebut meliputi penerimaan daerah (*revenue collection*), belanja pemerintah, alokasi kredit, persetujuan proyek-proyek investasi, kontrol atas harga-harga dan tingkat upah, foreign trade management dan penentuan kebijakan industri. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi menjadikan pemerintah daerah sebagai *"propelling the economic process"*. Yang menarik adalah pemerintah lokal menjadi entrepreneur dan stakeholders pada berbagai perusahaan yang mempunyai

motif "maximising employees" dan "government revenue opportunities". Jika *lessons learned* kita kaitkan dengan dengan konteks Indonesia maka pemerintah daerah harus pro terhadap pertumbuhan ekonomi dengan memberikan support terhadap investor tanpa mengurangi wewengnya sebagai pemegang kekuasaan politik di wilayah administrasinya.

Peran pemerintah daerah dalam mendukung perdagangan luar negeri sangat luas karena konsep trade facilitation mencakup beragam dimensi atau kegiatan. Secara umum, trade facilitation meliputi intervensi atas segala kegiatan bisnis dan investasi, kelancaran transportasi dalam negeri, prosedur proses ekspor dan impor, dan pengadaan sarana pergudangan (*International Finance Corporation, 2006*). Pemerintah daerah memang tidak mendapatkan manfaat langsung dari proses transaksi ekspor impor misalnya pajak ekspor dan bea masuk karena kedua instrumen fiskal ini wewenang pemerintah pusat. Namun kemudahan dalam mendukung proses tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah seperti pembentukan kawasan pergudangan sekitar pelabuhan laut yang dilengkapi dengan sarana pendukungnya serta profesionalisme pengelolanya. Pemerintah daerah akan mendapatkan manfaat dengan terciptanya daerah yang lebih pro perdagangan luar negeri dan akhirnya akan menciptakan potensi fiscal revenue.

International Finance Corporation (2006) telah mengidentifikasi beragam masalah dalam menciptakan ketidakefisienan prosedur sehingga meningkatkan mahalnya biaya proses perdagangan. Jika hal ini tidak dilakukan perbaikan akan mengurangi daya saing produk ekspor Indonesia. Ketidakefisienan itu adalah persyaratan yang berlebihan dalam membutuhkan data dan kelengkapan

dokumen, tidak adanya transparansi, lamanya proses legal, absennya koordinasi antar lembaga terkait, dan terjadinya kolusi antara oknum. Masalah yang terakumulasi karena terlambat penanganannya akan berdampak terhadap ekonomi wilayah karena pihak pengusaha kehilangan insentif ekonomi. Potensi ekonomi tidak akan dapat termanfaatkan karena pertimbangan marginal cost yang lebih tinggi dari marginal reventuennya. Dan dalam jangka panjang, jika industrinya *mobile* dapat diperkirakan akan terjadi migrasi ke wilayah-wilayah yang memberikan insentif lebih banyak dan lebih baik.

PENUTUP

ASEAN *trade facilitation* seperti harmonisasi pengklasifikasian kode tarif, dan prosedur kebeacukaan belum berdampak terhadap peningkatan volume perdagangan di kawasan ini. Namun kesepakatan pengakuan hasil pengujian atas produk (MRA) memperlihatkan potensi yang perlu diperluas kepada produk lainnya selain alat elektronik, farmasi dan kosmetik. Prosedur kebeacukaan yang menunjukkan tingkat efisiensi birokrasi masih menjadi kendala dalam mempermudah proses penyelesaian dokumentasi ekspor impor. Rendahnya *bureaucratic dan business efficiency* menjadi kendala besar dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kompetitif.

Pemerintah daerah dapat berperan penting dalam menciptakan birokrasi yang efisien dan juga memfasilitasi kelancaran proses ekspor impor sesuai dengan wewengannya seperti intervensi atas segala kegiatan bisnis dan investasi, kelancaran transportasi dalam negeri, dan pengadaan sarana pergudangan. Kebijakan yang diambil pemerintah Jawa Timur dengan

bekerjasama dengan lembaga internasional dapat menjadi contoh atau referensi bagaimana pemerintah daerah memberikan perhatian terhadap kelancaran perdagangan luar negerinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Hakim, Dedi Budiman. 2004. *The Implication of AFTA Trade Liberalisation on Agricultural Trade. A Recursive Dynamic Computable General Equilibrium Analysis*. A PhD Dissertation. Institut fuer Agrarökonomie Goerg-August-Universitaet Goettingen Germany
- Hampton, Andrea. 2006. *Local Government and Investment Promotion in China. Centre for the Future State*. Institute of Development Studies. Brighton, Sussex BN1 9RE England
- International Finance Corporation. 2006. *Improving Indonesia's Competitiveness: Case Study of Textiles and Farmed Shrimp Industries*. Volume 1. Foreign Investment Advisory Service. A Joint Facility of the World Bank and International Finance Corporation.

